

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	iii
Abstrak.....	v-xi
Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) oleh: Sali Susiana.....	1-12
Bentuk Lembaga yang Ideal dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar) oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun	13-26
Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta oleh: Achmad Muchaddam Fahham	27-36
Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak oleh: Teguh Kurniawan.....	37-51
Gambaran Manfaat Program <i>Family Development Session</i> Kementerian Sosial Republik Indonesia oleh: Tyas Wulandari dan Lukman Nul Hakim	53-62
Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir oleh: Mohammad Teja	63-76
Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Ketersediaan Air Baku PDAM Kabupaten Lebak oleh: Teddy Prasetiawan.....	77-92
<i>Book Review</i> Jalan Terjal Bersihkan Negeri oleh: Anih Sri Suryani	93-103
Tentang Penulis Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1 Juni 2015 ini berisi tujuh artikel dan satu *book review*. Tujuh artikel tersebut terdiri empat artikel hasil penelitian dan tiga artikel hasil studi kepustakaan. Empat artikel hasil penelitian tersebut: *pertama* bertajuk “Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” ditulis oleh Sali Susiana. Dalam artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa dua provinsi tersebut tidak menindaklanjuti SE Mendagri dengan alasan bahwa sebelum SE Mendagri dikeluarkan, telah terbentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama dengan Sekretariat PPRG Daerah. Namun demikian di kedua provinsi tersebut terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan PPRG, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (di Provinsi DIY) dan *Gender Budget Statement/GBS* (di Provinsi Papua). Setiap SKPD di Provinsi DIY wajib melakukan analisis gender dalam penyusunan kegiatan yang berperspektif gender. Ada pun di Provinsi Papua GBS telah diterapkan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BPSDA dan LH) serta Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir.

Kedua, bertajuk “Bentuk Lembaga yang Ideal dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)” dalam tulisan ini, Sri Nurhayati Qodriyatun berusaha menjawab dua pertanyaan utama, yakni: Bagaimana bentuk lembaga pengelolaan sampah di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar dan apa keuntungan serta kerugian dari bentuk-bentuk lembaga tersebut dalam pengelolaan sampah di daerah?; dan (2) Apa lembaga atau instansi daerah yang ideal untuk melakukan pengelolaan sampah? Hasil penelitian di dua daerah tersebut dan berdasarkan telaah terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang kelembagaan sampah di daerah memperlihatkan bahwa lembaga pengelolaan sampah di daerah sebaiknya berbentuk Dinas Daerah dan BLUD. Dinas Daerah menjadi regulator atau yang menyusun kebijakan dalam persampahan, dan BLUD yang melaksanakan kebijakan atau sebagai operator. Ada beberapa keuntungan ketika operator persampahan berbentuk BLU, yaitu sumber pendapatannya dapat dari berbagai macam. Selain dari APBD, BLUD dapat menerima pendapatan dari retribusi, dana hibah, investasi dari swasta, hasil usaha lainnya dari kegiatan pengelolaan sampah, seperti dari penjualan hasil daur ulang sampah, pemanfaatan gas metan sampah, dan lain sebagainya. Dengan pemisahan regulator dan operator dalam kelembagaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendapatkan banyak keuntungan. Dari sisi organisasi terjadi efisiensi, dan dari sisi anggaran dapat menghemat APBD.

Ketiga, bertajuk “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta” ditulis oleh Achmad Muchaddam Fahham. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi dan distribusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dan wawancara mendalam dengan pengelola wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi untuk kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Menurut studi ini, ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Artikel keempat, ditulis oleh Teguh Kurniawan dengan tajuk “Parlemen dalam Perlindungan Anak” Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perlindungan anak, peran pemerintah dan peran DPR dalam perlindungan anak. Data-data yang diperlukan diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian dikategorisasi, diklasifikasi, dan direduksi kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Hasil

studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan bagi anak melalui instrumen hukum dan ratifikasi berbagai peraturan perundangan tentang anak. Akan tetapi, peran pemerintah dalam perlindungan anak dipandang kurang efektif, oleh karena itu, lahir kemudian beberapa lembaga yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Parlemen sebagai institusi legislatif, juga berperan dalam perlindungan anak terutama dalam membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi terwujudnya perlindungan anak di Indonesia.

Artikel *kelima*, ditulis oleh Tyas Wulandari dan Lukman Nul Hakim dengan tajuk “Gambaran Manfaat Program *Family Development Session* Kementerian Sosial Republik Indonesia” dalam artikel tersebut kedua penulis menyimpulkan bahwa dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, Negara telah membuat Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan anak Kementerian Sosial RI berupaya membuat program *Family Development Session* dengan tujuan terbentuknya pengetahuan tentang pola asuh pada seluruh orang tua di Indonesia agar dapat mendukung perkembangan dan perlindungan anak. Penelitian ini berupaya melihat gambaran manfaat pelaksanaan program FDS tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan observasi terhadap tiga orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program FDS telah berhasil mengubah pola asuh para informan pada ketiga domain, yaitu affective, behavior dan cognitive. Ke depan pemerintah harus memastikan bahwa program FDS ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara DPR RI harus mendorong pemerintah agar lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat jasmani rohani karena telah mendapatkan pola asuh dan perlindungan yang tepat.

Artikel keenam, ditulis oleh Mohammad Teja dengan tajuk “Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Masyarakat Pesisir” dalam kajiannya ia menyimpulkan Indonesia masih memiliki sejumlah lahan tidur tidak terpakai, lahan tersebut sejatinya dapat dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang hidup di kawasan pesisir. Penulis secara khusus menelaah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Segara Anakan. Kawasan Segara Anakan memiliki dua potensi besar terkait dengan potensi sumber daya alam dan potensi letak geografis. Potensi besar tersebut sampai saat ini belum mampu dimanfaatkan secara maksimal. Ada dua kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi Segara Anakan, yakni belum mamadainya infrastruktur kawasan dan terbatasnya kesempatan kerja. Akibatnya lahirlah kemiskinan tengah-tengah masyarakat di sekitar kawasan Segara Anakan. Selain kemiskinan dampak ikutan lainnya adalah ancaman konflik sosial.

Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan kawasan Segara Anakan harus direncanakan dengan baik. Bukan hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, peran serta masyarakat lokal dalam pembangunan yang berpihak kepada keberlangsungan lingkungan tentunya menjadi tujuan utama pemerintah pusat dan daerah. Keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah kepada masyarakat setempat dengan mempersiapkan sumber daya manusia dalam keikutsertaan mengembangkan kawasan Segara Anakan menjadi pondasi majunya daerah tersebut. Pemberdayaan masyarakat yang sudah terencana secara matang dengan sumber daya yang tangguh tentunya dapat menunjang keberlangsungan lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah tersebut. Dengan begitu, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Artikel *ketujuh*, ditulis oleh Teddy Prasetiawan dengan tajuk, “Pengaruh Perubagan Iklim terhadap Ketersediaan Air Baku PDAM Kabupaten Lebak” studi ini menyimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan klimatologi, dilakukan prediksi terhadap ketersediaan air permukaan yang menjadi sumber air baku PDAM Lebak, yang meliputi DAS Ciujung, DAS Cimadur, dan DAS Cilangkahan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2050. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan analisis klimatologi yang menggunakan model-model iklim global sebagai input perhitungan neraca air dalam analisis hidrologi yang menggunakan metode Thornthwaite Mather. Saat dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan PDAM Lebak, diketahui bahwa terjadi defisit suplai air baku pada tahun 2029 dengan skenario B2 dan 2030 dengan skenario A2 di DAS Ciujung, tahun 2044 dengan skenario B2 dan 2046 dengan skenario A2 di DAS Cimadur, dan tahun 2037 dengan skenario B2 dan 2039 dengan skenario A2 di DAS Cilangkahan.

Terakhir, *bookreview* ditulis oleh Anih Sri Suryani dengan tajuk “Jalan terjal Bersihkan Negeri” menurut *reviewer*-nya penulisan rekam jejak perjalanan pengelolaan sampah di Indonesia termasuk pencatatan perkembangan teknologi yang sedang terjadi secara signifikan akhir-akhir ini sungguh penting. Karena

akan mempengaruhi pola penanganan sampah di masa yang akan datang. Teknologi ramah lingkungan, baik di sumber, tempat pengumpulan maupun sampai di TPA perlu terus dikaji dan dikembangkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Buku ini telah memberikan gambaran awal tahapan teknologi yang tengah terjadi dalam pengelolaan sampah di Indonesia akhir-akhir ini.

Buku ini juga menyajikan kisah yang berupa upaya-upaya yang memotivasi dan menggerakkan masyarakat luas dalam peningkatan kualitas pengelolaan sampah yang selama ini telah berhasil seperti pengembangan Bank Sampah yang ‘bak’ virus penyakit telah menyebar di seantero wilayah Indonesia.

Demikian juga, dari aspek kelembagaan dan regulasi, buku ini menyoroti upaya pemerintah dan kebijakan yang telah dilakukannya termasuk payung hukum yang telah ditetapkan. Walau dalam skala yang lebih luas, contoh-contoh dari beberapa kabupaten/kota lainnya perlu dipaparkan agar tergambar lebih jelas tantangan dan hambatan yang dialami pemerintah daerah di tengah tuntutan peningkatan mutu layanan kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat. Volume timbunan sampah di sumber juga makin tinggi, Padahal, dukungan regulasi dan finansial masih terbatas. Hal ini nampaknya yang perlu menjadi pembahasan apabila buku sejenis akan diterbitkan.

Upaya dari pihak swasta, sebagai bagian dari masyarakat dan *stakeholder*, perlu dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Dalam buku ini belum banyak diulas. Namun demikian, kisah sukses dan upaya yang dilakukan masyarakat baik secara individu maupun kelompok menunjukkan bahwa penanganan sampah pada skala komunal merupakan kunci sukses penyelesaian sampah di masa depan, mengingat keterbatasan lahan untuk TPS apalagi TPA. Buku ini, menurut *reviewer*-nya, penting untuk dibaca mengingat Indonesia masih mempunyai mempunyai pekerjaan rumah yang besar terkait isu persampahan ini.

Demikianlah, gambaran umum isi dari artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Aspirasi Vol. 6 Nomor 1, Juni 2015 ini. Semoga berbagai artikel yang diterbitkan itu, dapat memberi manfaat bagi pembaca terkait dengan isu-isu kedewanan pada khususnya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Juni 2015
Redaksi,

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Sali Susiana

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

**Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015
halaman 1-12**

ABSTRACT

Responsive Gender Planning and Budgeting (PPRG) is a government strategy to accelerate gender mainstreaming in development. At local level, local governments were mandated to establish the Secretariat of Local PPRG set forth by Circular Letter of the Minister of Home Affairs No.050/6199/SJ. This paper is a resume of a qualitative research on implementation of responsive gender planning and budgeting concept in Papua Province and Special Region of Yogyakarta. The study showed that both provinces did not establish the Secretariat of Local PPRG because they have similar institutions that have been exist before the circular letter was made. Besides that, those provinces have legal instruments about application of PPRG which is implemented in preparing Responsive Gender Budgeting (in Special Region of Yogyakarta) and Gender Budget Statement (in Papua Province).

Keywords: *Gender mainstreaming, responsive gender planning and budgeting, Papua Province, Special Region of Yogyakarta.*

ABSTRAK

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah strategi yang ditempuh pemerintah untuk mendukung upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pada tingkat daerah, diamanatkan untuk membentuk Sekretariat PPRG Daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/6199/SJ (SE Mendagri). Tulisan ini merupakan ringkasan hasil penelitian terhadap penerapan konsep PPRG yang dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua provinsi tersebut tidak membentuk Sekretariat PPRG Daerah dengan alasan bahwa sebelum SE Mendagri dikeluarkan, telah terbentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama dengan Sekretariat PPRG Daerah. Selain itu, di kedua provinsi terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan PPRG, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (di Provinsi DIY) dan *Gender Budget Statement/GBS* (di Provinsi Papua).

Kata kunci: Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Sri Nurhayati Qodriyatun

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

**Bentuk Lembaga yang Ideal dalam Pengelolaan Sampah di Daerah
(Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)**

Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015
halaman 13-26

ABSTRACT

Waste is common problem faced by many cities in Indonesia, but not all cities have provided a good waste services. One of the factors that affect the low level waste services in a city is a form of waste management agency or institution. In general, the capacity or the ability of the waste service institutions in many cities are smaller than the amount of waste that should they manage. The research has been done in 2013, by using qualitative methods. It is concluded that the institution of waste management needs to be split between the regulator and the operator. Dinas works as regulator and BLUD as operator. The separation of role on institution of the waste management will lead the institution's work getting more effective and efficient.

Keywords: *Waste management institution, waste management, waste services.*

ABSTRAK

Sampah termasuk permasalahan lingkungan yang dihadapi banyak kota di Indonesia, namun belum semua kota telah memberikan pelayanan persampahan dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah adalah bentuk lembaga atau institusi pengelola sampah yang pada umumnya kapasitas atau kemampuan institusi atau pengelola di daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus mereka kelola. Melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan metode kualitatif disimpulkan bahwa institusi pengelola sampah di daerah perlu memisahkan antara regulator dan operator sehingga pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan efisien dan efektif. Regulator dijalankan oleh Dinas dan operator dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kata kunci: Lembaga pengelola sampah, pengelolaan sampah, pelayanan persampahan.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Achmad Muchaddam Fahham

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

**Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015
halaman 27-36**

ABSTRACT

One of cash waqf management agency in Yogyakarta is Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Since the year 2011, this institution has manage cash waqf to increase well-being of Muslims in the area. This study aimed to describe the reason that prompted the agency to manage cash endowments, accumulation, investment and distribution. This research is qualitative. Data were collected through library research, focus group discussions and in-depth interviews with managers the Institution of Waqf and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. The collected data analyzed by means of categorization, classification, and reduction, after that it concluded in accordance with the objectives of the study.

The study concluded there are three reasons that drive Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta to manage cash endowments, namely theological, sociological and juridical reasons. Raising cash waqf is done in two stages: socialization and certification endowments. Endowments have accumulated cash is invested in deposits at the Bank Syariah BPD Yogyakarta. The value of the benefits derived from the investment funds used as a productive loan without interest. The loan funds must be returned to the Endowment and Land Management Agency PW NU DIY, so that these funds can be used by other borrowers in need. In practice, no loans were not paid off, because the refund of the loan without interest and administrative costs. In addition, the values of the benefits gained from the deposits are also used for education and health assistance.

Keywords: *Cash waqf, management, collecting, investment, distribution.*

ABSTRAK

Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2011, lembaga ini telah melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam di daerah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi dan distribusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dan wawancara mendalam dengan pengelola wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi untuk kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Studi ini menyimpulkan ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

Kata kunci: Wakaf tunai, pengelolaan, penghimpunan, investasi, distribusi.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Teguh Kurniawan

Pusat Studi al-Qur'an dan Kebangsaan (Pusaka) Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qu'an (PTIQ) Jakarta

Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak

Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015
halaman 37-51

ABSTRACT

This study aims to explain the conditions of the protection of children, the role of government and the role of the Parliament within the protection of children. The data obtained through library needed. The data has been categorized, classified, and reduced then be concluded in accordance with the objectives of the study. Results of this study concluded that the government has provided protection for children through legal instruments and ratification of various laws on children. However, the government's role in the protection seen as less effective, therefore, was born then several institutions aimed at protecting children, the National Commission for Child Protection (National Commission on Children) and the Indonesian Child Protection Commission (LPAI). Parliament as a legislative institution, also plays a role in the protection of children, especially to establish laws, monitoring of government policies, and the budget allocated for the realization of child protection in Indonesia.

Keywords: *Parliament, child protection, legislation, supervision, budgeting, National Commission on Children, KPAI.*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perlindungan anak, peran pemerintah dan peran DPR dalam perlindungan anak. Data-data yang diperlukan diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian dikategorisasi, diklasifikasi, dan direduksi kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan bagi anak melalui instrumen hukum dan ratifikasi berbagai peraturan perundangan tentang anak. Akan tetapi, peran pemerintah dalam perlindungan dipandang kurang efektif, oleh karena itu, lahir kemudian beberapa lembaga yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Parlemen sebagai institusi legislatif, juga berperan dalam perlindungan anak terutama untuk membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi terwujudnya perlindungan anak di Indonesia.

Kata kunci: Parlemen, perlindungan anak, legislasi, pengawasan, anggaran, Komnas Anak, KPAI.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Tyas Wulandari

*Satuan Bhakti Pekerja Sosial (SAKTI PEKSOS) Program Kesejahteraan Sosial Anak
Kluster Anak Balita Kementerian Sosial RI*

Lukman Nul Hakim

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

**Gambaran Manfaat Program *Family Development Session*
Kementerian Sosial Republik Indonesia**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015
halaman 53-62**

ABSTRACT

As an effort to protect Indonesian children, the State has made the Minister of Social Affairs Regulation No. 21 of 2013 on Child Care and Act No. 35 of 2014 on Child Protection. To optimize the child protection efforts, Ministry of Social Affairs seeks to make the program of Family Development Session (FDS) with the purpose to built the knowledge of parenting for Indonesian parents to supports the development and protection of children. This study seeks to see the benefits of the implementation of the FDS program. The research uses qualitative methods. The technique used to collect data is interview and observations of the three informants. The results showed that the FDS program has succeeded in changing the informants parenting style in all three domains, namely affective, behavior and cognitive. In the future, the government should ensure that the FDS program is felt by all the people of Indonesia. While the Parliament should encourage the government to be more creative and innovative to make Indonesian children healthy in spiritual and body owing, to the proper parenting and proper protection.

Keywords: *Family Development Session (FDS), child protection, PKSA Ministry of Social RI, parenting.*

ABSTRAK

Dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, Negara telah membuat Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan anak Kementerian Sosial RI berupaya membuat program *Family Development Session* (FDS) dengan tujuan terbentuknya pengetahuan tentang pola asuh pada seluruh orang tua di Indonesia agar dapat mendukung perkembangan dan perlindungan anak. Penelitian ini berupaya melihat gambaran manfaat pelaksanaan program FDS tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan observasi terhadap tiga orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program FDS telah berhasil mengubah pola asuh para informan pada ketiga domain, yaitu *affective, behavior* dan *cognitive*. Ke depan pemerintah harus memastikan bahwa program FDS ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara DPR RI harus mendorong pemerintah agar lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat jasmani rohani karena telah mendapatkan pola asuh dan perlindungan yang tepat.

Kata kunci: *Family Development Session (FDS), perlindungan anak, PKSA Kemensos RI, parenting.*

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Mohammad Teja

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir

Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015

halaman 63-76

ABSTRACT

Indonesia still has some wasted land. With the utilization of existing natural resources, sustainable communities through empowerment is expected to use the land to improve their welfare as well as environmental sustainability guard. Natural resources wisely utilized by the local community is expected to crushing poverty that has long fallen on them. The data used in this article come from secondary data, journals and the results of published studies and using literature methods. Community empowerment through improving the quality of education and knowledge should be encouraged by the central government, local government and investors. Through the cooperation, the local community is expected to be able to participate and play a role in the development of the area.

Keywords: *Empowerment, coastal society, investment, Cilacap.*

ABSTRAK

Indonesia masih memiliki sejumlah lahan tidur tidak terpakai. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan diharapkan dapat menggunakan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus sebagai penjaga keberlangsungan lingkungannya. Potensi alam yang dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat setempat diharapkan mampu menggilas kemiskinan yang telah lama menimpa mereka. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari data sekunder, jurnal dan hasil penelitian yang sudah diterbitkan dengan menggunakan metode literatur agar mendapatkan alternatif mengenai dampak sosial dari pengembangan kawasan Segara Anakan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan perlu didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor. Melalui kerjasama tersebut diharapkan masyarakat setempat mampu ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah tersebut.

Kata kunci: Pemberdayaan, masyarakat pesisir, investasi, Cilacap.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 6 No. 1 Juni 2015

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Teddy Prasetiawan

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Ketersediaan Air Baku PDAM Kabupaten Lebak

Jurnal ASPIRASI Vol. 6 No. 1 Juni 2015

halaman 77-92

ABSTRACT

PDAM Kabupaten Lebak highly depends on surface water as their only water resources. Currently, it abundantly flows in almost all region of Kabupaten Lebak. However, could it sufficiently provides the raw water in order to anticipate the improvement of service and the impact of climate change? By considering the condition of geology, hydrogeology, hydrology, and climatology, prediction is conducted to determine the availability of raw water supply for PDAM Lebak (Ciujung, Cimadur, and Cilangkahan river basin during the period from 2015 to 2050. The analysis is performed by integrating the climatological analysis using global climate models and water balance analysis using the Thornthwaite Mather method. When the analysis result meets the water demand projection of PDAM Lebak service area, it is known that raw water supply will occur in the year 2029 using B2 scenario and 2030 using A2 scenario in the Ciujung river basin, 2044 using B2 scenario and 2046 using A2 scenario in the Cimadur river basin, and 2037 using B2 scenario and 2039 using A2 scenario in the Cilangkahan river basin.

Keywords: *Climate change, river basin, raw water supply deficit.*

ABSTRAK

Suplai air baku PDAM Lebak sangat bergantung kepada air permukaan dalam memenuhi kebutuhan air bakunya. Saat ini ketersediaannya masih melimpah dan mengalir di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Namun, apakah ketersediaan air baku tersebut dapat menjawab tantangan peningkatan pelayanan dan ancaman perubahan iklim? Dengan mempertimbangkan kondisi geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan klimatologi, dilakukan prediksi terhadap ketersediaan air permukaan yang menjadi sumber air baku PDAM Lebak, yang meliputi DAS Ciujung, DAS Cimadur, dan DAS Cilangkahan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2050. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan analisis klimatologi yang menggunakan model-model iklim global sebagai input perhitungan neraca air dalam analisis hidrologi yang menggunakan metode Thornthwaite Mather. Saat dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan PDAM Lebak, diketahui bahwa terjadi defisit suplai air baku pada tahun 2029 dengan skenario B2 dan 2030 dengan skenario A2 di DAS Ciujung, tahun 2044 dengan skenario B2 dan 2046 dengan skenario A2 di DAS Cimadur, dan tahun 2037 dengan skenario B2 dan 2039 dengan skenario A2 di DAS Cilangkahan.

Kata kunci: Perubahan iklim, daerah aliran sungai (DAS), defisit suplai air baku.